

PENDIDIKAN NILAI: UPAYA MENGATASI KONFLIK IDENTITAS DAN KRISIS NILAI

Ahmad Saefudin, Subaidi
Universitas Islam nahdlatul Ulama Jepara
ahmadsaefudin547@gmail.com
subaidi@unisnu.ac.id

Abstrak:

Penelitian ini mendeskripsikan pentingnya pendidikan nilai sebagai upaya mengatasi konflik identitas pada diri peserta didik. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pernyataan fundamental antara lain; (1) memahami terminologi nilai dan pendidikan nilai, (2) mengelaborasi strategi dan landasan pendidikan nilai, dan (3) mengetahui urgensi pendidikan nilai. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: 1) Nilai adalah sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Pendidikan nilai ialah penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri peserta didik, 2) strategi pendidikan nilai meliputi *value identifications* (identifikasi nilai), *activity* (kegiatan), *learning aids* (alat bantu belajar), *unit interaction* (interaksi kesatuan), dan *evaluation segment* (bagian penilaian). Adapun landasan yang digunakan adalah landasan filosofis, psikologis, sosial, dan estetik, dan 3) urgensi pendidikan nilai adalah untuk mengatasi konflik identitas dan krisis nilai dalam diri peserta didik.

Kata kunci: pendidikan nilai, konflik identitas, krisis nilai

Abstract:

This study describes the importance of value education as an effort to overcome identity conflicts in students. The focus of this research is to answer several fundamental statements, among others; (1) understand the terminology of values and value education, (2) elaborate on the strategies and foundations of value education, and (3) know the urgency of value education. This research is a qualitative study using a descriptive-analytic approach. This research resulted in the following conclusions: 1) Value is something that is considered good, useful, and most true according to the beliefs of a person or group of people. Value education is the cultivation and development of values in students, 2) the value education strategy includes value identification, activity, learning aids, unit interaction, and segment evaluation. (assessment section). The foundation used is the philosophical, psychological, social, and aesthetic foundation, and 3) the urgency of value education is to overcome identity conflicts and value crises in students.

Key words: value education, identity conflict, value crisis

A. Pengertian Nilai

Definisi “nilai” sangat abstrak dan subyektif tergantung dari konteks pemaknaan seseorang. Ketika berucap, “buku ini sangat bernilai, melebihi apapun,” maka asumsi kita sebagai audiens tidak akan sama. Mungkin saja, ada yang berpikir bahwa buku tersebut bernilai secara ekonomis karena mahal. Ada lagi yang beranggapan bahwa buku itu berharga, meskipun secara nominal murah, sebab penerbitnya sudah tidak cetak ulang dan sulit mendapatkannya. Juga bisa jadi, kadar nilai buku tersebut terletak pada goresan tanda tangan asli sang penulis di balik sampulnya. Deskripsi singkat ini menunjukkan betapa tidak mudah menerjemahkan istilah “nilai”. Belum lagi jika menafsirkan “nilai” yang melekat pada “sesuatu” yang tidak kasat mata, seperti kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak salah apabila Max Scheler seperti yang dikutip Purwo Hadiwardoyo menegaskan bahwa “nilai” merupakan suatu kenyataan yang pada umumnya tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain.¹

Walaupun sulit meramu padanan kata yang pas dalam mendefinisikan “nilai”, bukan berarti tidak ada patokan standar dari para ahli. Gordon Allport, misalnya, sebagai

seorang psikolog berpendapat bahwa “nilai” adalah keyakinan seseorang bertindak atas dasar pilihannya.² Persoalan keyakinan menjadi cakupan dimensi kejiwaan (psikologis) manusia di mana setiap individu mempunyai pandangan tersendiri dan tidak seragam. Lain lagi dengan Kupperman yang menganggap nilai sebagai patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif.³ Kepakarannya di bidang Sosiologi membuat Kupperman menitikberatkan interpretasi “nilai” dikaitkan dengan norma sosial. Sesuatu yang bernilai ialah sesuatu yang sesuai dengan tatanan norma yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan “nilai” yang benar dan diterima secara universal mengacu kepada ulasan Linda dan Richard Eyre adalah nilai yang menghasilkan perilaku dan perilaku itu berdampak positif baik bagi yang menjalankan maupun orang lain.⁴ Kejujuran dianggap bernilai ketika terejawantahkan dalam tindakan seseorang, tidak cukup hanya tersimpan dalam pikiran, hati, maupun dalam bentuk verbalisasi *an sich*.

¹ EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hlm. 32.

² Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

³ *Ibid.*

⁴ Linda dan Richard Eyre, *Mengajarkan Nilai-Nilai kepada Anak*, terj. Alex Tri Kantjono Widodo, cet. ke-2 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. xxiv.

Supaya tidak terlalu lama berkuat pada ruang definitif dan menghindari bertambahnya perdebatan terminologis dalam tulisan ini, ada baiknya mengupas konsep “nilai” dimulai dari akar katanya, yaitu bahasa Latin *vale're* yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, dan berlaku.⁵ Nilai adalah sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang.⁶ Rohmat Mulyana menambahkan bahwa nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.⁷ Apapun bentuknya, -baik disandarkan pada aspek psikologis, etis, atau moral,- jika “sesuatu” itu mampu dijadikan rujukan dan membuat yakin si pelaku dalam menentukan pilihan tindakan, maka “sesuatu” tersebut sudah bisa dikatakan mempunyai “nilai”.

B. Hirarki Nilai

Benarkah “nilai” bersifat hirarkis sehingga memungkinkan kedudukan “nilai” yang satu lebih tinggi atau lebih rendah dengan “nilai” yang lain? Max Scheler memberikan pedoman dasar dalam menentukan struktur tingkatan “nilai” dengan kriteria: semakin tahan lama, semakin tinggi; semakin dapat dibagikan tanpa mengurangi maknanya, semakin tinggi; semakin tak bergantung pada nilai-nilai lain, semakin tinggi;

semakin membahagiakan semakin tinggi; dan semakin tak tergantung pada kenyataan tertentu, maka derajatnya semakin tinggi.⁸ Kemudian Scheler mengelompokkan “nilai” secara hirarkis ke dalam 4 tingkatan, yaitu nilai-nilai kenikmatan, kehidupan, kejiwaan, dan kerohanian.⁹ Penggolongan yang dilakukan Scheler ini masih menyisakan celah untuk kita kritik. Penempatan nilai-nilai kerohanian pada posisi terakhir, bagi masyarakat yang mempunyai kesadaran agama (*religious consciousness*) tentunya sangat tidak relevan. Kalau pun diharuskan mengikuti alur pemikiran Scheler, aspek kerohanian sepatutnya menempati *ranking* teratas, meskipun menurut hemat penulis, nilai-nilai tersebut lebih elegan apabila didudukkan dalam *frame* yang saling melengkapi dan tidak parsial dengan menafikan salah satu dimensi nilai tertentu.

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai luhur kebangsaan, Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Indonesia secara eksplisit meletakkan nilai ketuhanan pada hirarki tertinggi. Menurut Notonagoro, hal ini karena nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber dari nilai-nilai kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial.¹⁰

Perspektif pendidikan Islam, Kamrani Buseri memperkenalkan

⁵ Sutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai-Karakter; Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 56.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

⁸ EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai ...*, hlm. 39.

⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

¹⁰ Notonagoro dalam Sutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai ...*, hlm. 64.

konsepsi nilai Ilahiah yaitu nilai yang dikaitkan dengan konsep, sikap, dan keyakinan yang memandang berharga apa yang bersumber dari Tuhan atau dalam arti luas memandang berharga terhadap agama.¹¹ Nilai Ilahiah mencakup:

1. Nilai *imaniah*, yakni konsep, sikap, dan keyakinan yang memandang berharga mengenai adanya Tuhan dan segenap atribut-Nya, juga mengenai hal-hal gaib yang termasuk ke dalam kerangka rukun iman.
2. Nilai *ubudiah*: konsep, sikap, dan keyakinan yang memandang berharga terhadap ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan.
3. Nilai *muamalah* ialah konsep, sikap, dan keyakinan yang memandang berharga hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam di bawah kerangka tuntunan Tuhan.¹²

C. Pendidikan Nilai

Nilai (*value*) yang pada awalnya digunakan dalam dunia ekonomi¹³ pada perkembangannya memasuki bidang lain seperti persoalan moral etis (baik-buruk), estetika (indah-tidak indah), kognitif (benar-salah), filsafat, dan juga pendidikan. Nilai dalam aliran filsafat klasik meliputi idealisme, realisme,

pragmatisme.¹⁴ Dalam aliran filsafat pendidikan, seperti yang telah kita ketahui bersama, nilai digolongkan pada tiga aliran besar yaitu perenialisme, eksistensialisme, dan progresivisme.¹ Adapun nilai dari sudut pandang filsafat nilai setidaknya melahirkan aliran

¹⁴ Paham idealis meyakini bahwa nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan berada pada wilayah yang paling tinggi dan bersifat universal dan berlaku sebagai nilai akhir (*end*) dan objektif. Persamaan antara realisme dengan idealisme ialah pendapatnya tentang ketetapan nilai-nilai fundamental (absolut). Bedanya, kaum realis tidak hanya menyandarkan nilai-nilai fundamental tersebut pada wilayah gagasan, namun juga harus teralami dalam kenyataan. Sehingga, cara berpikir kaum realis bersifat induktif. Paham terakhir dari aliran filsafat klasik ini melihat nilai sebagai sesuatu yang relatif, berubah seiring dengan perubahan masyarakat dan budaya. Klaim nilai universal dari kaum idealis dan realis tidak berlaku bagi kaum pragmatis. Pragmatisme mempercayai bahwa yang bernilai ialah yang berguna (*utility*) dan bersifat sementara. Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 60-63.

¹ Tuhan merupakan sumber nilai universal bagi kaum perenialis. Nilai-nilai kebenaran *ilahiyah* menjadi fokus utama dalam proses pendidikan. Ikhtiar manusia cukup menjadi usaha untuk menjemput takdir Tuhan. Tanggapan kontradiktif datang dari kalangan eksistensialis yang menganggap nilai sebagai upaya mutlak manusia. Manusia secara bebas memilih nilai-nilai yang diinginkan tanpa mempedulikan campur tangan Tuhan. Bagi aliran progresivisme, nilai merupakan bagian integral dari pengalaman yang relatif, temporal, dan dinamis. Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 64-66.

¹¹ Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai Ilahiah Remaja Pelajar*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

¹² *Ibid.*

¹³ Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*, (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 30.

hedonisme,² eudomonisme,³ dan utilitarisme.⁴

Dengan mengetahui basis filosofis tentang “nilai”, maka akan memudahkan pemahaman kita dalam pembahasan “nilai” yang dikaitkan dengan dunia pendidikan. Menurut M. Sastrapratedja pendidikan nilai ialah penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seseorang.⁵ Pendapat ini diperjelas oleh Rohmat Mulyana bahwa pendidikan nilai harus mencakup keseluruhan aspek sebagai pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan secara konsisten.⁶ Pendidikan nilai merupakan tanggung jawab bersama, bukan melulu diimpikan pada institusi pendidikan (sekolah). Generasi yang *pintar dan baik*⁷ – seperti yang diistilahkan Thomas Lickona- akan terpancang kuat dalam peradaban suatu bangsa dengan syarat

dukungan utuh dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Orientasi pendidikan nilai diharapkan mampu diterapkan oleh guru dalam ikhtiar membentuk nilai (kepribadian) anak didik, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang diinginkan, dan membimbing perilaku mereka agar konsisten dengan nilai-nilai tersebut.⁸ Dalam sudut pandang Said Aqil Husin Al Munawar, prioritas sublimasi nilai-nilai Qur’ani menjadi tujuan pokok proses pembelajaran. Nilai ini meliputi tiga dimensi utama, yaitu dimensi spiritual (iman, takwa, dan akhlak mulia), dimensi budaya (kepribadian mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan, dan kebangsaan, dan dimensi kecerdasan (cerdas, kreatif, terampil, disiplin, etos kerja, profesional, inovatif, dan produktif).²³

D. Strategi Pendidikan Nilai

Strategi di dalam ruang lingkup pendidikan diartikan sebagai *a plan, method, or series of activities designed to achieves a particular educational goal*.²⁴ Secara sederhana strategi ialah rencana, metode, atau serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kniker menyusun strategi pendidikan nilai melalui lima tahapan yang

² Berasal dari bahasa Yunani *hedone* yang berarti apa yang baik ialah yang menimbulkan efek kepuasan dan kesenangan. Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 67.

³ Yang bernilai ialah yang membahagiakan (*eudaimonia*). Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 68.

⁴ Yang bernilai ialah yang berguna. Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 69.

⁵ EM. K. Kaswardi, *Pendidikan Nilai ...*, hlm. 3.

⁶ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 119.

⁷ Selengkapnya lihat dalam Thomas Lickona, *Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*, terj. Lita S., cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2013).

⁸ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 120.

²³ Said Aqil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), hlm. 8-9.

²⁴ David dalam Sutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai ...*, hlm. 85.

disesuaikan dengan jumlah huruf di dalam kata *value*. *Pertama, value identifications* (identifikasi nilai) yaitu siswa diharuskan mengetahui nilai yang menjadi target pembelajaran. *Kedua, activity* (kegiatan). Setelah nilai tersebut teridentifikasi, kemudian siswa dibimbing melalui tindakan-tindakan yang diarahkan pada penyadaran nilai. *Ketiga, learning aids* (alat bantu belajar). Dukungan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar, memudahkan pencapaian nilai yang menjadi target pembelajaran. *Keempat, unit interaction* (interaksi kesatuan). Hubungan dialogis dan multiarah dari guru kepada siswa harus terbangun dalam atmosfer pembelajaran yang mengarah pada penyadaran nilai. Kesatuan interaksi ini dikemas dengan apik agar tidak terjadi dominasi baik oleh guru maupun siswa tertentu. *Kelima, evaluation segment* (bagian penilaian). Tahapan terakhir ini bertujuan untuk menilai kemajuan belajar siswa tentang serapan nilai-nilai yang menjadi tujuan pembelajaran.²⁵

Notonagoro menetapkan empat langkah yang harus ditempuh agar pendidikan nilai berdaya guna, yaitu:

1. Para pendidik terlebih dahulu harus tahu dan jelas dengan akal budinya serta memahami dengan hatinya nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan para pendidik.
2. Para pendidik mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada peserta

didik dengan sentuhan hati dan perasaan melalui contoh-contoh konkret.

3. Para pendidik membantu peserta didik untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut tidak saja dalam akal budinya, tetapi dalam hati sanubari peserta didik sehingga nilai-nilai yang dipahaminya menjadi bagian dari seluruh hidupnya.
4. Peserta didik yang telah merasa memiliki sifat-sifat dan sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut didorong dan dibantu untuk mewujudkan atau mengungkapkannya dalam tingkah laku dan hidup sehari-hari.²⁶

Sedangkan contoh langkah-langkah strategi praksis dalam penumbuhan nilai *ilalahiah* pada konteks lembaga pendidikan formal, di antaranya:

1. Guru memberikan contoh sesuatu yang mengandung dilema nilai sehingga memungkinkan adanya proses pemilihan alternatif oleh peserta didik, misalnya seorang guru melemparkan topik, “apa yang harus dilakukan siswa untuk menjaga keharmonisan pergaulan bertetangga dalam lingkungan masyarakat yang penduduknya berbagai agama?” Topik ini tentu banyak alternatif sekaligus juga mengandung dilema yang harus dijawab oleh peserta didik.
2. Setelah peserta didik mempunyai alternatif jawaban, mereka diminta bertukar pikiran melalui metode

²⁵ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan...*, hlm. 105.

²⁶ Notonagoro dalam Sutarjo Adi Susilo, *Pembelajaran Nilai...*, hlm. 73.

diskusi, sehingga terjadi proses penghayatan lebih dalam dan memunculkan pertimbangan-pertimbangan baru untuk dijadikan alternatif jawaban. Guru menerapkan pendekatan normatif-empirik atau tekstual-kontekstual sebagai basis analisa.

3. Selanjutnya, dari berbagai dasar pertimbangan yang diambil, peserta didik dapat mengorganisasikan nilainya sendiri, baik dalam bentuk tertulis maupu lisan yang akhirnya diharapkan bisa terwujud dalam perilaku keseharian.²⁷

²⁷ Nilai *ubudiah* bisa ditanamkan kepada peserta didik dengan cara: 1) Memberi contoh dalam tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan 2) Mengajarkan nilai-nilai sehingga anak dapat membedakan nilai-nilai yang boleh dianut dan yang terlarang. Lain halnya dengan strategi penumbuhan nilai *muamalah* di mana proses internalisasinya meliputi: 1) Menyimak; diawali dengan guru yang memberikan sebuah cerita yang di dalamnya mengandung peristiwa tertentu yang sarat dengan nilai. Misalnya, peristiwa seseorang yang tertangkap basah karena perbuatan mesum, yang di dalamnya tergambar beragam penampilan/perilaku dari orang-orang yang ada di sekitar dan yang terlibat dengan peristiwa tersebut. Kemudian peserta didik diminta berkomentar. 2) Menanggapi; peserta didik yang lain diajak untuk menanggapi komentar tersebut. 3) Memberi nilai; peserta didik diminta untuk memberikan penilaian terhadap berbagai perilaku pada peristiwa di atas dari segi baik/buruk, benar/salah, sesuai dengan nilai ilahiah lengkap dengan alasan-alasannya. 4) Mengorganisasi nilai; peserta didik diminta mendudukan nilai yang dianggapnya paling tertinggi di antara nilai-nilai yang dianggapnya baik/benar. 5) Internalisasi; peserta didik diajak berpikir reflektif untuk menghayati lebih mendalam dan memberi makna setiap nilai yang ditemui dalam cerita di atas, sehingga akan terjadi proses filosofis mengenai nilai. Guru mengkombinasikan pendekatan ini dengan sentuhan emosi yang mampu menggugah siswa. Baca dalam Kamrani Buseri, *Nilai-Nilai Ilahiah* ..., hlm. 198-211.

Strategi di atas hanyalah sedikit contoh dari berbagai strategi pendidikan nilai di dalam proses pembelajaran. Tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan strategi lain sesuai dengan kebutuhan di masing-masing unit satuan pendidikan. Misalnya, strategi pendidikan nilai dengan metode keteladanan, kemandirian, pembudayaan, dan pengembangan kreativitas.

E. Landasan Pendidikan Nilai

1. Landasan Filosofis

Perdebatan para pemikir di bidang filsafat, khususnya tentang hakikat manusia menjadi salah satu landasan pendidikan nilai. Rohmat Mulyana

mengulangi *statement* Kartono yang merangkum bermacam-macam julukan yang melekat pada manusia dalam kacamata filsafat. Manusia merupakan *animal*

educandum (hewan yang bisa dididik), *homo sapiens* (manusia yang mengetahui dan dibekali dengan akal), *homo ludens* (manusia yang bermain-main), *homo recens* (manusia yang membuat sejarah), *homo faber* (manusia teknis yang menggunakan alat-alat), *homo symbolicum* (manusia yang mengenal simbol-simbol bahasa), *homo concors* (manusia yang hidup seimbang antara dirinya dengan orang lain dan masyarakat sekitar), *homo econimicus* (manusia sebagai makhluk ekonomi), dan *animal rational* (hewan yang

rasional).²⁸ Dalam *maqalat Arab* kita pernah mendengar istilah *hayawan al-nathiq* (manusia adalah hewan yang mampu berpikir).

Meskipun demikian, filsafat Pendidikan Nilai tidak bermaksud untuk memihak pada salah satu pandangan di atas yang kebenarannya bersifat nisbi. Filsafat Pendidikan Nilai secara selektif menggunakan terma-terma tersebut yang disesuaikan dengan konteks situasi dan kondisi di mana substansi kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara argumentatif dan ilmiah.

Di samping itu, Al-Qur'an melambangkan manusia sebagai makhluk yang paling unik dan baik (QS. At-Tin (95): 4), makhluk potensial (QS. Al-A'raf (7): 172), makhluk yang menghamba (QS. Al-Zariyat (51): 56), makhluk yang menjadi khalifah di muka bumi (QS. Al-Baqarah (2): 30), makhluk yang berperasaan dan berkehendak (QS. Al-Kahfi (18): 2), makhluk yang bertanggung jawab atas segala perbuatannya (QS. Al-Thur (52): 21), dan makhluk yang berakhlak.²⁹

2. Landasan Psikologis

a. Motivasi

Motivasi dalam pandangan Kretch merupakan kekuatan psikis yang mendorong seseorang untuk memulai atau mempertahankan tingkah

lakunya. Motivasi menjadi penting sebagai landasan Pendidikan Nilai sebagai pendorong tindakan siswa berdasarkan pilihan kebenaran, kebaikan, dan keindahan.³⁰

b. Perbedaan Individu (*Individual Differences*)

Keanekaragaman karakteristik siswa yang unik berimplikasi pada pemilihan materi Pendidikan Nilai secara eklektik sesuai dengan topik pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks kehidupan.³¹

c. Tahapan Belajar Nilai

Empat tahapan belajar nilai menurut Egan, yaitu:

1) Tahap Mitos

Tahap ini berlangsung pada anak dalam rentang usia 5-10 tahun. Anak belajar melalui cara bermain dan bercerita. Nilai-nilai masih dipandang dalam kerangka *oposisi binner* (baik-jelek, sayang-benci, suka-tidak suka, dll.). Karena itu, pada tahap ini diperlukan kesabaran dari guru maupun orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

2) Tahap Romantis

Pada usia 8-15 tahun anak semakin penasaran terhadap informasi baru yang belum diketahuinya. Mereka mencoba hal-hal baru yang dianggap masih asing bagi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, cet. ke-12 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 12-20.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 127.

³¹ *Ibid.*, hlm. 128-129.

dirinya. Di sinilah peran guru dan orang tua untuk senantiasa memastikan dan mengontrol anak didiknya agar informasi baru yang diperoleh tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut.

3) Tahap Filosofis

Pada fase ini, anak memasuki usia remaja (14-20 tahun). Aspek psikologis siswa dalam menilai “sesuatu” masih labil, mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, dan cenderung mengambil keputusan dengan pertimbangan sendiri. Diperlukan kehati-hatian guru dan orang tua ketika menyisipkan nilai-nilai kebaikan kepada anak didik agar tidak bertentangan dengan gejolak jiwa dan pemikirannya.

4) Tahap Ironis

Tahapan terakhir ini sering disebut dengan fase remaja akhir atau dewasa. Orang yang sudah memasuki usia 20 tahun ke atas mulai mencari jati dirinya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Mereka menyukai hal-hal yang sifatnya kontradiktif dan membingungkan. Semakin banyak nilai-nilai yang diajarkan oleh guru dan orang

tua, semakin menambah kedewasaan berpikir mereka.³²

3. Landasan Sosial

Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan interaksi dengan makhluk lainnya, eksistensi manusia berada di tengah-tengah antara kepentingan individu (*absolute egoism*) dengan kepentingan orang lain (*absolute altruism*). Proses sosial membutuhkan aturan-aturan normatif berlandaskan asas mufakat. Aturan-aturan sosial akan melindungi manusia dari dua kepentingan ekstrim di atas.

Sebagai proses penyadaran nilai pada peserta didik, Rohmat Mulyana menekankan bahwa Pendidikan Nilai perlu dirancang dengan mengangkat nilai-nilai kehidupan sosial yang aktual dan kontekstual. Peserta didik dibimbing untuk mampu menjalin hubungan sosial secara harmonis dengan orang lain melalui sikap yang baik.³³

4. Landasan Estetik

Menurut Maxine Grenee, nilai estetik perlu dibelajarkan pada peserta didik agar mereka mengetahui bagaimana cara belajar bermakna. Grenee mengistilahkan dengan *vital center*, yakni suatu titik ketika proses belajar diperlukan sebagai ajang penyadaran nilai-nilai keindahan dan penyertaan

³² *Ibid.*, hlm. 129-130.

³³ *Ibid.*, hlm. 133.

timbangan rasa secara optimal.³⁴ Lumrahnya manusia, mereka sejatinya menyukai segala bentuk hal yang bernilai indah (estetis). Tetapi, nilai estetik ini tidak boleh bertentangan dengan landasan Pendidikan Nilai yang lain. Hal ini menjadi penting supaya tidak ada lagi kasus-kasus amoral yang mengatasnamakan nilai estetika dan seni.

F. Urgensi Pendidikan Nilai

Perkembangan alat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian cepat mempengaruhi cara pandang seseorang dalam menilai obyek (benar-salah, baik-buruk, indah dan tidak indah). Bahkan, bagi mereka yang hanyut dalam pusaran arus global dengan segala dampak yang ditimbulkannya, tanpa filterisasi, memungkinkan seseorang tidak mampu lagi mendefinisikan –atau sebaliknya terlalu mengagungkan- identitas diri dan kelompoknya. Kondisi demikian –perspektif Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty- mengantarkan mereka pada satu situasi yang dikenal dengan konflik identitas.³⁵ Dalam skala masif, konflik identitas, baik yang bermuara dari faktor etnisitas, suku, maupun agama, mengancam keutuhan dan ketahanan Nasional. Padahal, Negara tidak lagi mampu membendung laju perubahan teknologi³⁶ sehingga informasi dan ide-ide bergerak liar memasuki arena

pertarungan wacana (*discursive struggle*) setiap warga Negara.

Senada dengan Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, Muzayyin Arifin memperingatkan kepada kita bahwa benturan antarnilai yang diakibatkan oleh kecanggihan alat teknologi informasi, jika terus berkembang tanpa penyelesaian, akan menimbulkan efek “krisis nilai” dalam masyarakat modern.³⁷

Oleh karena itu, urgensi penerapan Pendidikan Nilai dengan segala perbedaan konsep terminologinya³⁸ sudah tidak bisa *ditawar-tawar* lagi sebagai upaya mengatasi konflik identitas dan krisis nilai yang kian akut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Salah satu upaya Pemerintah dalam menanamkan pendidikan nilai ialah dengan mewajibkan setiap sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan agama.³⁹ Rumusan Standar Isi Pendidikan Agama salah satunya ditujukan sebagai upaya membangun

³⁷ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 62.

³⁸ Di era 1960-an, kita pernah mengenal istilah “Pendidikan Budi Pekerti” dalam kurikulum pendidikan Nasional. Pada zaman orde baru, pendidikan budi pekerti berganti dengan nama baru yaitu “Pendidikan Moral Pancasila”. Pasca reformasi, muncul konsep-konsep lain seperti “Pendidikan Nilai” dan “Pendidikan Karakter”. Dari berbagai istilah dalam pendidikan tersebut, secara substansial memiliki spirit yang sama, yakni membunikan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan pada insan pembelajar. Secara detail lihat dalam Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter...*, hlm. 2-7.

³⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah Pasal 3 ayat (1).

³⁴ *Ibid.*, hlm. 134-135.

³⁵ Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, terj. Amat Asnawi, cet. ke-1 (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 826.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 840.

sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, ikhlas, dan bertanggung jawab serta mewujudkan kerukunan antar umat beragama.⁴⁰ Proses pembelajaran pendidikan agama dilakukan dengan mengedepankan keteladanan dan pembiasaan akhlak mulia serta pengamalan ajaran agama. Keteladanan dan pembiasaan sebagai upaya penanaman pendidikan nilai sukar terwujud apabila guru tidak mampu menampilkan citra positif di depan peserta didiknya. Citra diri positif guru tercermin dari sosoknya yang dapat “digugu” (ditaati) karena ucapannya memuat nasehat kebenaran (*truthfulness*) dan kejujuran (*fairness*) menuju jalan hidup selamat. Selain itu, guru juga mampu menempatkan dirinya menjadi figur yang dapat “ditiru” (diikuti) karena perilakunya mengandung keteladanan akhlak (*moral*) dan karakter baik (*good character*).⁴¹

Secara khusus Guru Pendidikan Agama harus memiliki kompetensi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah pasal 16 yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, dan kepemimpinan. Kompetensi pedagogik

meliputi: a) pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; b) penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama; c) pengembangan kurikulum pendidikan agama; d) penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama; e) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama; f) pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama; g) komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; h) penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama; i) pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan j) tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama. Kompetensi kepribadian meliputi: a) tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; b) penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; c) penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; d) kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta e) penghormatan terhadap kode etik profesi guru. Kompetensi sosial mencakup: a. sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Arif Rohman, *Guru dalam Pusaran Kekuasaan: Potret Konspirasi dan Politisasi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 1.

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; b) sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan c) sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat. Kompetensi profesional antara lain: a) penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama; b) penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama; c) pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif; d) pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan e) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi kepemimpinan meliputi: a) kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama; b) kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; c) kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta d) kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar

pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A., Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Al Munawar, Said Aqil Husin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005.
- Ali, Mohammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, cet. ke-12, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Arifin, Muzayyin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Buseri, Kamrani, *Nilai-Nilai Ilahiah Remaja Pelajar*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Kaswardi, EM. K., *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Grasindo, 1993.
- Lickona, Thomas, *Pendidikan Karakter; Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik*, terj. Lita S., cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Linda dan Richard Eyre, *Mengajarkan Nilai-Nilai kepada Anak*, terj. Alex Tri Kantjono Widodo, cet. ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Mansbach, Richard W. & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global*, terj. Amat Asnawi, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Mulyana, Rohmat, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, cet. ke-2, Bandung: Alfabeta, 2011.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.

Rohman, Arif, *Guru dalam Pusaran Kekuasaan: Potret Konspirasi dan Politisasi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Susilo, Sutarjo Adi, *Pembelajaran Nilai-Karakter; Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.